



(LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Berau



BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tahun 2024

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Sekretariat daerah Kabupaten Berau ini disusun. Agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023

Tanjung Redeb, Pebruari 2024
SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700723 200212 1 001



Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan penilaian atas hasil kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa parameter tersebut, diperoleh Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama : **Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani**

a. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Kategori Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B (62) terealisasi C (43,06) atau belum mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,45 persen.

b. Indikator Nilai/Predikat AKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Berau target B (67) terealisasi 62,40 atau belum mencapai target dengan tingkat capain kinerja sebesar 93,13 persen.

c. Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat target 92,16 terealisasi 92,16 atau sudah mencapai target. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

2. Sasaran Kedua : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah

- a. Indikator predikat/status LPPD di tingkat provinsi (kategori kabupaten) Kabupaten Berau dengan target Status/Predikat Tinggi dan terrealisasi Sedang dengan nilai 3,1964 atau telah melebihi target.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatkan bantuan penyelesaian kasus hukum

- a. Indikator Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan dengan target 100 persen dan terealisasi 100 persen atau mencapai melebihi target 130 persen

4. Sasaran Keempat : Meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)

- a. Indikator Indeks proses Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan target 65 persen terrealisasi 73,2 persen atau melebihi target. Dengan capaian kinerja 120 persen

5. Sasaran Lima : Meningkatkan Realisasi Pelaksanaan APBD

- a. Indikator Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD dengan target 100 persen terealisasi 88,05 persen atau mencapai

Dengan demikian, dari hasil perolehan penilaian capaian kinerja tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 rata-rata capaian kinerja 94,80 persen. Ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target namun masih dalam kategori baik, hal ini menjadi bahan evaluasi dan akan di perbaiki di tahun berikutnya.

Daftar Isi



Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Gambaran Sekretariat Daerah.....	8
C. Susunan Organisasi.....	8
D. Keragaman SDM	11
E. Aspek Strategis Organisasi.....	12
F. Isu Strategis.....	13
G. Sarana dan Prasarana.....	14
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran	18
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	18
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	28
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.....	28
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau	28
2. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	28
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	30
C. Analisis Capaian Kinerja	31
Analisis Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	57
D. Realisasi Anggaran.....	58
Bab IV Penutup.....	65

LAMPIRAN :

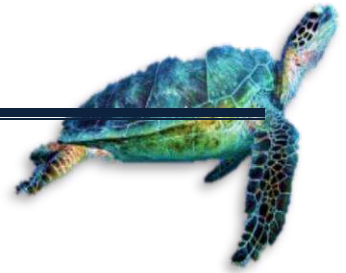
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	68
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023	70
Perjanjian Kinerja Utama	75
Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	77
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023	79

Daftar Tabel



Tabel I.1	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan.....	11
Tabel I.2	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	14
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel II.2	Program/Kegiatan Tujuan dan Sasaran	21
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	23
Tabel II.5	Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2023	24
Tabel II.6	Anggaran Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	27
Tabel III.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.....	28
Tabel III.2	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Triwulan	30
Tabel III.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	33
Tabel III.4	Sasaran I Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani.....	34
Tabel III.5	Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	35
Tabel III.6	Indikator Kinerja Kategori Nilai/Predikat AKIP	37
Tabel III.7	Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat	39
Tabel III.8	Sasaran II Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah	44
Tabel III.9	Sasaran III Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum.....	48
Tabel III.10	Sasaran IV Meningkatnya Pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya..... (value for money)	51
Tabel III.11	Sasaran V Meningkatnya Realisasi APBD	55
Tabel III.12	Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2023	58
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	58
Tabel III.11	Alokasi Anggaran Belanja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	62
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	63

Daftar Gambar



Gambar I.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 203	10
Gambar I.2	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar I.3	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan	12

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Gambaran Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibentuk Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

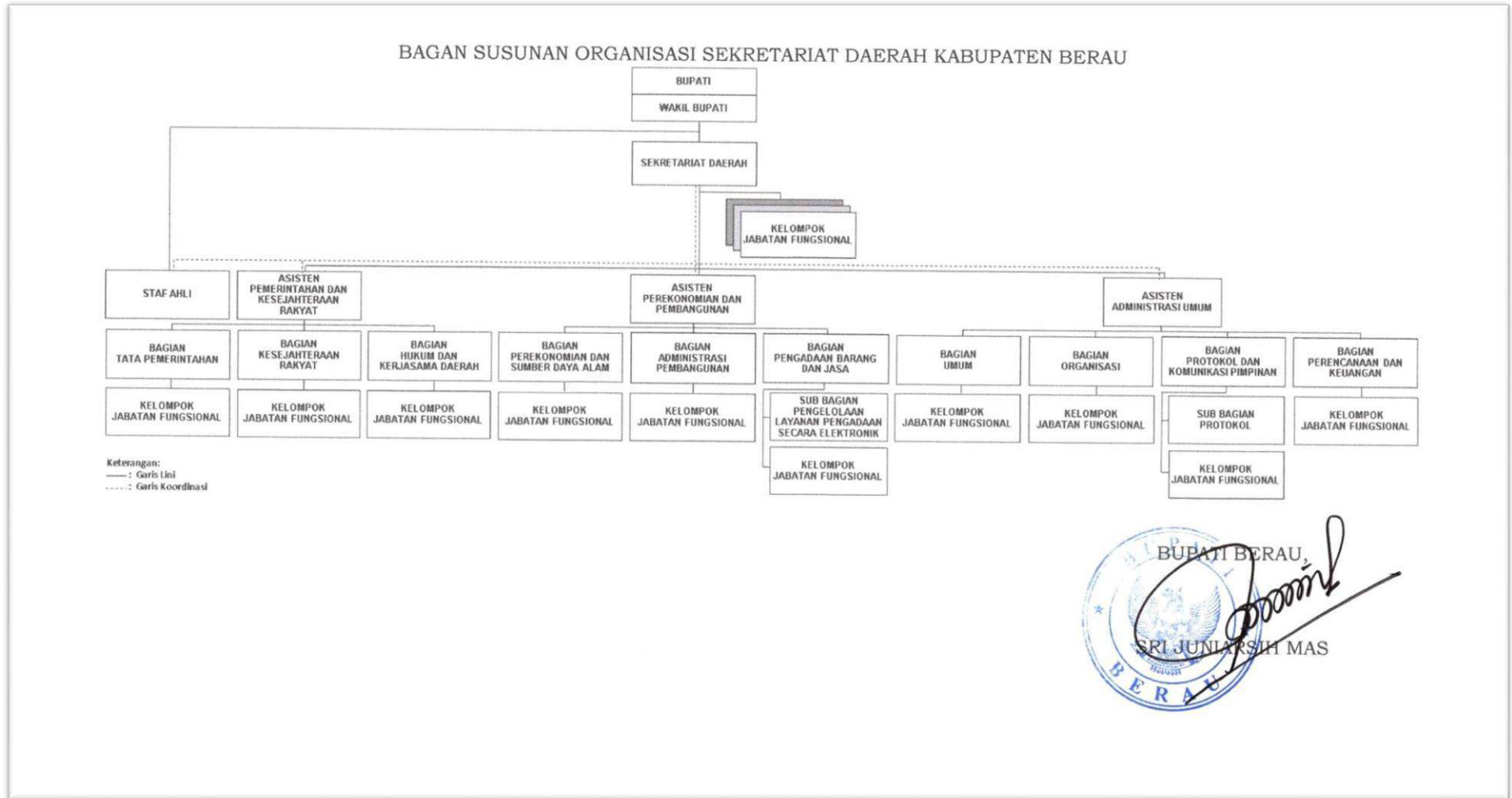
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 48 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Asisten dan Pembangunan dan Perekonomian membawahkan :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Organisasi, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Protokol
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan ;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023



D. KERAGAMAN SDM

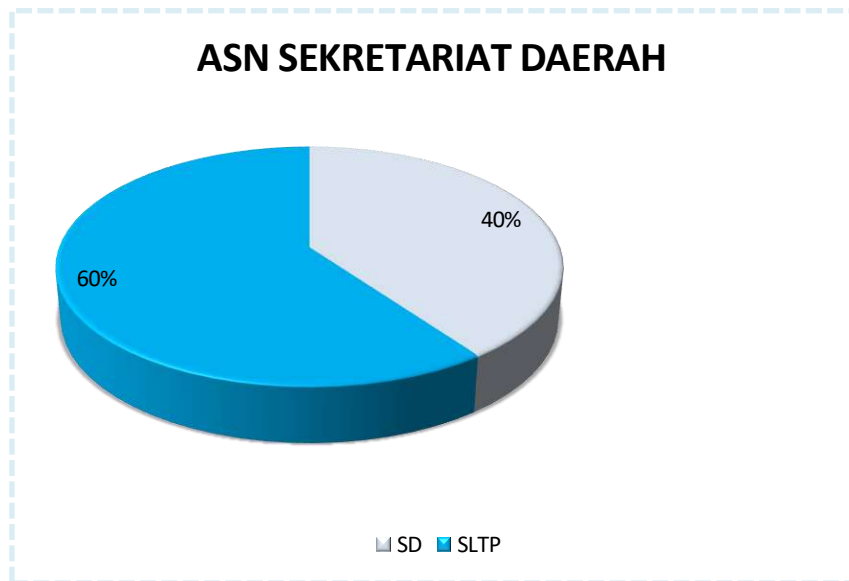
Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 148 orang, yang terdiri dari 98 orang laki-laki (59,75%) dan 50 orang perempuan (40,25%).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan SD sebanyak 2 orang, SLTP 3 orang, SMA sebanyak 43 orang, dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 68 orang, dan S2 sebesar 22 orang.

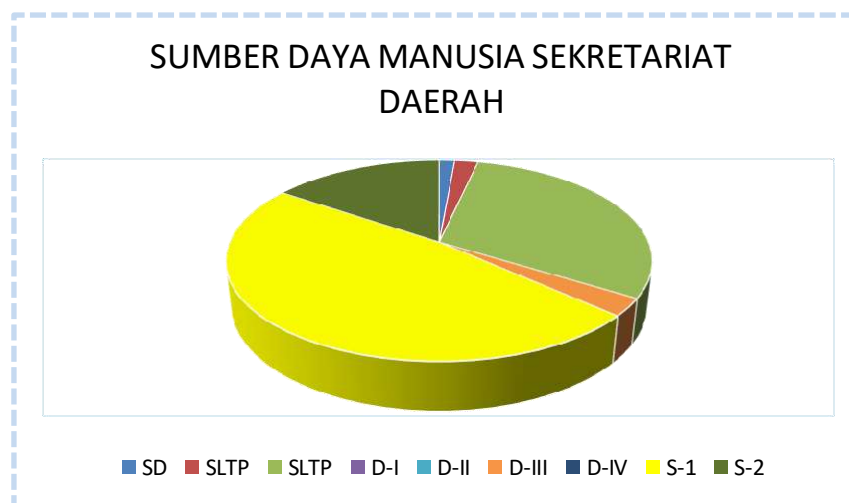
Tabel I.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN									
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	SEKRETARIS DAERAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	ASISTEN I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	ASISTEN II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	ASISTEN III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Bag. Tata Pemerintahan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	2
9	Bag. Hukum dan Perundang-Undngan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	2
10	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	5	1
11	Administrasi Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	6	2
12	Peerekonomian dan SDA	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-
13	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	8
14	Bagian Protokol dan Kamunikasi Pimpinan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	2
15	Bag. Organisasi	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	2
16	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	6	2
17	Bag. Umum	-	-	2	3	16	-	-	-	-	-	11	1
	JUMLAH	6	1	2	3	43	0	0	4	0	68	22	

Sumber data : Bagian Umum, 2023



Gambar I.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar I.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau mempunyai peran strategis meliputi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sehingga baik buruknya kualitas perumusan dan kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Berau sangat dipengaruhi oleh kinerja personil Sekretariat Daerah. Selain itu Sekretariat Daerah mempunyai ketugasan yang sangat penting dalam mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

F. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang menjadi perhatian pada tahun 2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrative bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaankesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hokum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaaan barang dan jasa.

6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam hal sarana dan prasarana Sekretariat Daerah memiliki aset sebagaimana berikut:

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

No	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai (Rp)	Jumah Item
1	Tanah		286.436.616.406,00	25
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor		
	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Rumah Dinas		
	Tanah Banguna Perumahan Lain – lain	Gudang		
	Tanah Kampung Lain-lain	TPU		
	Penggalian	Lahan Galian C		
	Tanah Banguna Pasar	Pasar		
	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Pendidikan		
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kesehatan		
	Tanah Lapangan Terbang Printis	Bandara		
	Tanah Lapangan Komersial	Bandara		
	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	Bandara		
	Tanah Untuk Bangunan Jalan Lain-lain	Pelabuhan		
	Tanah Kampung Lain-lain	TPU		

	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Perumnas		
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Asrama		
	Tanah Bangunan Industri Lainnya	Lahan Pabrik Biodisel		
	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Kesehatan		
	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	Tempat Ibadah		
	Tanah Bangunan Pelabuhan Udara	Bandara		
	Tanah Bangunan Olah Raga	Pendidikan		
	Tanah Banguna Puskesmas/Posyandu	Kesehatan		
	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	Keamanan		
	Tanah Jalan	Jalan		
	Tanah Jembatan	Jembatan		
	Tanah Bangunan Jln dan Jembatan Lain-lain	Turap		
2	Peralatan dan Mesin		47.048.418.722,00	
3	Gedung dan Bangunan		40.018.987.910,00	11
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lain-lain	Gedung dan Arsip		
	Bangunan Gudang tertutup Permanen	Gudang Tertutup		
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Mushola		
	Gedung pos jaga Permanen	Pos Jaga		
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Garasi Kendaraan R2 dan R4		
	Rumah Negara Gol I Permanen	Rumah Dinas		
	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	Bangunan Mess Berau		
	Asrama Permanen	Asrama Pelajar		
	Tugu/Tanda Batas Admisntrasi Kecamatan	Batas Wilayah Kecamatan/Kampung		
	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	Bangunan Tempat Baliho		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		440.905.000,00	5
	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Gardu Halaman Mesjid Agung		

	Pembangkit Listrik Tenaga Disel lain-lain	Battery dan Power System		
	Jalan Gang	Gang Pemancar		
	Jaringan Transmisi Lain-lain	Instalasi Listrik		
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	Penambahan Daya		
5	Aset Tetap Lainnya		384.348.700,00	6
	Buku Umum Lain – lain	Bahan bacaan dan Per-UU-an		
	Teknologi	Software		
	Pahatan Lain – lain	Bahan Fardhu Kifayah		
	Alat Musik / Band	Mixxer, Keybord Rumah Jabatan		
	Alat Olah Raga Lainnya (Lain - lain)	Lapangan Tenis Meja		
	Tanaman Holtikultura	Tanaman Hias		
6	Aset Tidak Beerwujud		309.987.350,00	
7	Aset Lain-lain		5.397.039.150,00	
	Jumlah		372.007.276.738,00	

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Berau ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Startegis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021- 2026 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Berau periode 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan

- berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau diatas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik”**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani, dengan indikator sebagai berikut :
 1. Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Nilai /Predikat AKIP Kab.Berau
 3. Survei Kepuasan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator sebagai berikut
 1. Status Kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
- 3) Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum
 1. Persentase permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan
- 4) Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (valur for money)
 1. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- 5) Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD
 1. Persentase realisasi pelaksanaan Kegiatan APBD

3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif.

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Proses perencanaan strategis merupakan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Berau.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik	Indeks Reformasi	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	CC (58)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (70)	BB (76)
			Nilai/Predikat AKIP	Nilai	99	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	B (72)
			Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	101	A (89,66)	A (90,12)	A(92,16)	A(94,06)	A(96,26)	A (98)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/St atus	100	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	85,33	61 (CUKUP)	61 (CUKUP)	65 (CUKUP)	81(BAIK)	81(BAIK)	85(BAIK)	
	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase RealisasiPelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel II.2

Program / Kegiatan, Tujuan, Sasaran

1	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang Baik	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Nilai/Predikat AKIP	Nilai			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai			
2		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/Status	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Adminstrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
3		Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
4		Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
5		Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Semua PD	Bagian Organisasi
		Nilai/Predikat AKIP	Hasil Evaluasi	Semua PD	
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dan Kemendagri	Semua PD	Bagian Tata Pemerintahan
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	-	-	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
4	Pengadaan Barang/Jas yang memberikan pemenuhan nilai manfa yang sebesar- besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase RealisasiPelaksanaan Kegiatan APBD	-	Semua PD	Bagian Adm Pembangunan

C. PERJANJI KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A(92,16)
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (CUKUP)
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase RealisasiPelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100%

NO	Program /Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.54.021.699.200
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Rp.31.282.798.000
3	Program Perekonomian dan pembangunan	Rp.4.298.881.304

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Berau melaksanakan 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) dan 69 (enam puluh Sembilan) sub kegiatandengan Anggaran Murni sebesar Rp. 90,784,433,652.00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi RP. 138,821,917,083.00. Adapun realisasi Anggaran sebesar Rp. 119,478,759,894.00 (86,07%)

2. Target Belanja Sekretariat Daerah

Tabel II.5
Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUT		
1	2	3
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)	138.821.917.083,00
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)	73.116.775.734,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.998.800,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87.999.800,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.999.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.838.389.293,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.660.310.293,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	966.040.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	212.039.000,00
	Admnistrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	888.274.000,00
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000,00
7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000,00
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	8.685.745.500,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500,00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000,00

12	Penyediaan Barang Catakan dan Peggandaan	205.400.000,00
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.162.837.000,00
14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.350.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.138.774.000,00
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.194.430.000,00
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.405.610.440,00
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.021.592.000,00
19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	156.540.000,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.980.440,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.484.002.528,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.830.000,00
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000,00
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000,00
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640,00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900.582.643,00
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.746.643,00
27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107.836.000,00
28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000,00
Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah		3.426.347.200,00
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.072.609.600,00
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	655.931.600,00
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000,00
Penataan Organisasi		2.024.109.400,00
32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400,00
33	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509.250.000,00
34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		10.186.941.930,00

	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000,00
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000,00
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930,00
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		57.175.205.725,00
	Administrasi Tata Pemerintahan		3.705.078.000,00
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.281.803.000,00
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.631.115.000,00
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	792.160.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		50.389.475.525,00
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.786.752.431,00
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.826.912.900,00
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.775.810.194,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.605.501.200,00
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	.018.726.000,00
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	708.748.000,00
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	878.027.200,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		475.151.000,00
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	339.531.000,00
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	135.620.000,00
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		6.965.301.304,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.125.000.000,00
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000,00
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000,00
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.015.481.000,00
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000,00
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000,00
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2.759.820.304,00
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	991.115.000,00
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	04.637.304,00
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	664.068.000,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.065.000.000,00
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000,00
1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.564.634.320,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000,00

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000,00
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000,00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320,00
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000,00
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000,00
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.948.000,00
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00

Sumber Data : DPPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel II.6
Anggaran Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	2.024.109.400,00	1.750.184.564,00	86,47
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	792.160.000,00	758.433.433,00	95,74
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	708.748.000,00	640.313.850,00	90,34
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money)	991.115.000,00	867.264.358,00	87,50
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	632.052.000,00	483.259.845,00	76,46

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau memperoleh nilai sebesar **65,25 (enam puluh lima koma dua lima)** dengan kategori **B (BAIK)**, yang menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai eselon IV (Subkoordinator). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,00	Belum dapat dibandingkan
2	Pengukuran Kinerja	30%	20,40	
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00	
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,00	
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	65,25	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

2. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Berau Nomor 700/6/LHE-KLJIP/2023 tanggal 28 Pebruari 2024 perihal Hasil Evaluasi LKjIP Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sebagian sasaran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau belum dapat menggambarkan isu strategis atau alasan utama

eksistensi Sekretariat Daerah tersebut;

- Perencanaan Kinerja belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar bidang yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;
- Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum ada diagram *crosscutting*
- Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, digambarkan dengan diagram (*cascading*)

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum ada Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- Pengukuran Kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment

3) Pelaporan Kinerja

- a) Laporan kinerja belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pelaksanaannya
- b) Laporan kinerja belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja secara detail per pencapaian kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah belum melaksanakan evaluasi internal dengan berpedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih dapat menggambarkan isu

strategis atau alasan utama eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

- 2) Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja agar dapat menggambarkan hubungan sebab akibat dan menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi sehingga dapat terlihat hubungan lintas fungsi antar bidang
- 3) Membuat penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, digambarkan dengan diagram (*cascading*)
- 4) Membuat dokumen perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;
- 8) Dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar berpedoman dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel III.2

Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)	Indeks RB disampaikan per Tahun oleh Kementrian PAN dan RB	B (62)	C (43,06)	69,45
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)	Nilai AKIP disampaikan per Tahun oleh Kementrian PAN dan RB	B (67)	B (62,40)	93,13
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (92,16)	Pemkab Berau menyampikan Laporan SKM ke biro organisasi Provinsi Kaltim dan kemenpan rb pertahun	A (92,16)	A (92,16)	100

2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat/St atus	Tinggi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD disampaikan per Tahun oleh Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mendagri	Tinggi (3,41)	Sedang (3,1964)	93,74	
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%	Sasaran Strategis ini tidak memiliki target pe triwulan	100	130	130	
4	Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (CUKUP)	Sasaran Strategis ini tidak memiliki target pe triwulan	65 (cukup)	71,91 (Baik)	109,5%	
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100%	Triwulan I	16,67%	100%	16,67%	16,67%
					Triwulan II	50,00%	100%	50,00%	50,00%
					Triwulan III	75,00%	100%	75,00%	75,00%
					Triwulan IV	100%	100%	76,46 %	76,46 %

C. ANALIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran,

hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan atau suatu sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dan juga sebagai perbaikan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara lain yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai, keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B(62)	C (43,06)	69,45%
		Kategori Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)	B (62,40)	93,13%
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (90,16)	A (90,16)	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat LPPD tingkat Provinsi (kategori Kabupaten)	Predikat / Status	Tinggi	Sedang (3,1964)	93,74%
3	Meningkatnya bantuan	Presentase	Persen	100	130	130%

	penyelesaian kasus hukum	Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan				
4	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value fir money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (cukup)	71,91 (Baik)	109,5%
5	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Persen	100	76,46	76,46%

=====

SASARAN I

MENINGKATNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFESIEN DAN MELAYANI

=====

Tabel III.4

Sasaran I Meningkatnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Melayani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)	C (43,06)	69,45
		Nilai SAKIP Kabupaten Berau	Nilai	B (67)	B (62,40)	93,13
		Kategori				
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A 92,16)	A (92,16	100

1. Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi Indikator Kinerja

Tabel III.5

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)	C (43,06)	69,45

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (55,67)	C (43,06)	-12,61

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76)	C (43,06)	56,66

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Ket. (+/-)
1	Kategori Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (55,67)	C (43,06)	-

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Kategori Reformasi Birokrasi Tahun

2023 antara lain :

1. Awareness yang kurang terkait pentingnya pelaksanaan RB di Kabupaten Berau
2. Budaya kolaboratif untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya kolaboratif belum maksimal
3. Masih adanya Silo Mentality yang cukup nyata dalam pemerintahan sehingga cenderung mengurangi bahkan menghilangkan efisiensi kerja, merusak moral, dan mentalitas ASN

Solusi

1. Perlunya penekanan oleh pucuk tertinggi pimpinan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau dalam melaksanakan RB
2. Perlu adanya inisiatif yang tinggi oleh setiap individu untuk mencari informasi terkait bidang tugasnya, sehingga dapat duduk bersama dan melaksanakan pekerjaan kolaboratif dengan baik
3. Eliminasi Silo Mentality dengan cara penyamaan visi seluruh ASN. Seluruh ASN wajib memahami hal-hal umum lain yang terkait dengan pemerintahan, bukan hanya hal pemerintahan yang terkait dengan bidang tugasnya saja. Hal tersebut dapat membawa ke keadaan yang harmonis untuk melakukan pekerjaan kolaboratif. Serta pentingnya untuk melakukan eksekusi yang presisi terhadap seluruh jenis pekerjaan bagi setiap ASN.

2. Indikator Kinerja Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Berau

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban setiap daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan atas anggaran yang telah digunakan. Sasaran kualitas akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju good governance.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada asas keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan partisipasi

masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :

Tabel III.6

**Indikator Kategori Nilai/Predikat AKIP
Kriteria Penilaian**

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Sub-Komponen 1 : Keberadaan 20 %	Sub-Komponen 2 : Kualitas 30 %	Sub-Komponen 3 : Kualitas 50 %	
1	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
3	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

RINCIAN HASIL EVALUASI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,42
2	Pengukuran Kinerja	30	17,94
3	Pelaporan Kinerja	15	10,06
4	Evaluasi Internal	25	11,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	B (67)	B (62,40)	93,13

Hasil evaluasi tahun 2023 “ jika diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 0,78 poin. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pengontrolan dan pengawasan mengenai capaian kinerja program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan SAKIP.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Kategori Nilai/ Predikat AKIP

Tahun 2023 antara lain :

1. Nilai AKIP pada triwulan Pertama belum rilis aktivitas yang dilakukan adalah proses tahapan pembuatan sk tim, pengumpulan data sakip dan rapat tim sakip.
2. Permasalahan belum sepenuhnya Perangkat Daerah yang memahami sistematisa pengisian dokumen SAKIP yang akan diminta dan data pendukung terkadang tidak ada selain itu juga pejabat yang membidangi sakip terkadang ada yang di pindahkan kan sehingga perlu tahapan awal lagi dalam pembelajaran sakip.

Solusi

1. Memberikan bimtek atau asistensi kepada Perangkat Daerah
2. **Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Berau**

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam pelayanan publik yang telah

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara periodik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel III.7

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,12	92,16	100

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningk an/Penu r unan
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,12	92,16	2,04

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (98)	92,16	94,04

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Ket. (+/-)
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,12	92,16	+

Dari tabel diatas dapat dilihat kategori survei kepuasan masyarakat Kabupaten Berau untuk tahun 2023 masih belum keluar hasil survei kepuasan masyarakat, hal ini masih tahapan proses perekapan laporan oleh perangkat daerah terkait laporan SKM. Sedangkan untuk tahun 2022 kategori A yaitu dengan nilai mencapai 84,56 jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi 90,31 dengan kategori A. Jika dilihat dari capaian kinerja terkait indikator survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Berau menunjukkan hal yang positif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik, yang mana masuk dalam kategori A.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai abdi masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

❖ Perlu diketahui peraturan-peraturan yang mendasari tentang pelaksanaan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat

- ❖ Selain itu ada perbedaan unsur pelayanan yang dimuat dalam setiap peraturan sehingga terjadi perubahan pengukuran nilai rata-rata dan ini sangat berpengaruh terhadap laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Perbandingan Peraturan Kementerian PAN & RB terkait pedoman SKM

KEP/25/M.PAN/2/2004	PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014	PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
1. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan	1. Persyaratan
2. Persyaratan pelayanan	2. Prosedur	2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Kejelasan petugas pelayanan	3. Waktu Pelayanan	3. Waktu Penyelesaian
4. Kedisiplinan petugas pelayanan	4. Biaya/Tarif	4. Biaya/Tarif
5. Tanggung jawab petugas pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan	6. Kompetensi Pelaksana	6. Kompetensi Pelaksana
7. Kecepatan pelayanan	7. Perilaku Pelaksana	7. Perilaku Pelaksana
8. Keadilan mendapatkan pelayanan	8. Maklumat Pelayanan	8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Kesopanan dan keramahan petugas	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	9. Saran dan Prasarana
10. Kewajaran biaya pelayanan		
11. Kepastian biaya pelayanan		

12.Kepastian jadwal pelayanan		
13.Kenyamanan lingkungan		
14.Keamanan pelayanan		

Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan disetiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu

1. Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat memuat dengan memuat 14 unsur pelayanan tetapi belum mengacu pada
 - UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan.
 - Ruang lingkup SKM belum selaras dengan Komponen Standar Pelayanan
 - Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 81,26 – 100.00

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat dengan memuat 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan tetapi dalam Peraturan ini belum :
 - Mengatur teknis operasional pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
 - Metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan sehingga tidak ada keseragaman hasil survei
 - Penentuan jumlah sample responden belum diatur
 - Hasil survei belum dipublikasikan
 - Skor kepuasan masyarakat dalam kuantitatif dapat dikonversikan dalam bentuk kualitatif (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Buruk)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 Unsur Pelayanan. Dalam Peraturan ini telah diatur antara lain
 - Unsur Pelayanan ada memuat Saran dan Prasarana
 - Penetapan responden menggunakan sample Morgan dan Krejcie
 - Analisa Tindak Lanjut Hasil Survei dan rencana tindak lanjut
 - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus di Publikasi
 - Interval yang digunakan untuk mencapai nilai yang Sangat Baik (A) masih dengan angka 88,31 – 100.00 karena dibanding dengan interval peraturan sebelumnya hanya mencapai 81,26 – 100.00.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Kategori Reformasi Birokrasi

Tahun 2023 antara lain :

1. OPD atau Bagian yang belum memahami tata cara penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Solusi :

1. Monitoring dan Evaluasi ke Perangkat Daerah
2. Mengetahui kelemahan dan kekuatan penyelenggara pelayanan publik serta capaian kinerja secara periodik.
3. Perlu pembelajaran kepada Perangkat Daerah yang belum memahami tata cara penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2018.

=====

SASARAN II

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARA KINERJA DAERAH

=====

Tabel III.8

Sasaran II Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Predikat /Status	Tinggi	Sedang (3,1964)	93,74

4. Indikator Kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Realisasi Indikator Kinerja

N	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%

o Kinerja					Capaian
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi	Sedang	93,74

Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada hasil penilaian KEMENDAGRI Tahun 2020 atas LPPD Kab. Berau Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/Penurunan
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Rendah (2,18)	Sedang (3,1964)	146,62

Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada hasil penilaian KEMENDAGRI Tahun 2020 atas LPPD Kab. Berau Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/Status	Tinggi	Sedang	

Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada hasil penilaian KEMENDAGRI Tahun 2020 atas LPPD Kab. Berau Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Ket. (+/-)
----	-------------------	--------	----------------	----------------	------------

4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau	Predikat/St atus	Tinggi	Sedang	-
---	--	---------------------	--------	--------	---

Ket : * Realisasi pencapaian mengacu pada hasil penilaian KEMENDAGRI Tahun 2020 atas LPPD Kab. Berau Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menunjukkan capaian Sedang dengan skor 3,1964. Hasil evaluasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capaian tahun 2023, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Status Kinerja **Tinggi** (Skor 3,41). Namun capaian di tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian Status Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau adalah **Rendah** (Skor 2,81).

- **Penyebab Peningkatan/Penurunan Keberhasilan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Berau Tahun 2023 antara lain :**

1. Perubahan Regulasi Peraturan perundang undangan yang mengatur indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. perencanaan dan penganggaran belum memperhatikan IKK urusan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana amanat Peraturan perundang-undangan
3. kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan data IKK Penyelenggraan Urusan pemerintahan
4. kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pelaksanaan IKK urusan pemerintahan daerah
5. belum optimalnya capaian hasil dan keluaran penyelenggraan pemerintahan daerah karena belum teranggarkan secara baik dan optimal.

- **Solusi :**
 1. melaksanakan Bimbingan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur
 2. mengintegrasikan IKK dalam DOKRENDA
 3. penguatan peran Tim dan perkuat Koordinasi dalam pelaksanaan Urusan

=====

SASARAN III

=====

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA BANTUAN PENYELESAIAN HUKUM

=====

Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyatakan “*penanganan perkara Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum*”. Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau juga diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditujukan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang terdiri dari ASN, Non-ASN dan CPNS dalam hal terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata, TUN dan Pidana (hanya untuk pendampingan pada tingkat penyidikan). Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, diberikan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan baik yang menyangkut permasalahan hukum antara Pemerintah dengan Masyarakat atau Masyarakat dan Perusahaan/Badan Hukum Perdata atau Publik lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau guna untuk memudahkan dalam penanganan

permasalahan hukum dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun jumlah penanganan permasalahan hukum baik litigasi dan non-litigasi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 13 Permasalahan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Tabel III.9

Sasaran III Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya Bantuan Penyelesaian Hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	130	130%

5. Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	130	130%

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkatan/ Penurunan
----	-------------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------------------

5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	130	+30%
---	---	--------	-----	-----	------

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	130	130

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Ket. (+/-)
			2022	2023	
5	Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%	130%	+30%

Catatan:

Realisasi ini hanya berdasarkan realisasi pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau, untuk realisasi secara nasional Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki data tersebut

Dari Tabel diatas dapat dilihat Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyatakan “*penanganan perkara Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum*”. Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau juga diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditujukan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang terdiri dari ASN, Non-ASN dan CPNS dalam hal terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata, TUN dan Pidana (hanya untuk pendampingan pada tingkat penyidikan). Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi, diberikan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan baik yang menyangkut permasalahan hukum antara Pemerintah dengan Masyarakat atau Masyarakat dan Perusahaan/Badan Hukum Perdata atau Publik lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau guna untuk memudahkan dalam penanganan permasalahan hukum dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Hasil evaluasi tahun 2023 **terdapat peningkatan dalam capaian target** dikarenakan jumlah kasus yang masuk sepanjang tahun 2023 meningkat, ini sudah termasuk dalam penanganan perkara lanjutan dari tahun sebelumnya.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Presentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan Tahun 2023 antara lain :

1. Ada dinamika permasalahan di masyarakat baik terhadap Pemerintah Daerah maupun pada lingkup masyarakat dan badan hukum perdata/publik;
2. Adanya kebijakan yang dianggap keliru atau merugikan masyarakat di waktu yang lalu, sehingga menimbulkan gugatan saat ini.

Solusi :

1. Melaksanakan penataan terhadap berkas/dokumen administrasi yang berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat agar pada saat timbul permasalahan dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
2. Melakukan upaya penyelesaian secara non-litigasi (diluar pengadilan) terhadap permasalahan yang terjadi, dalam hal penyelesaian secara non-litigasi tidak tercapai maka penanganan permasalahan hukum secara litigasi (di Pengadilan) dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
3. Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Berau terkait dengan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan yang berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Peraturan Perundang-Undangan.

SASARAN IV

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA PENGADAAN BARANG /JASA YANG MEMEBERIKAN PEMENUHAN NILAI MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA (VALUE FOR MONEY)

Tabel III.10

Sasaran IV Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (cukup)	71,91 (Baik)	90,39

	for money)				
--	------------	--	--	--	--

6. Indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (cukup)	71,91 (Baik)	110,6

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningkan/Penu r unan
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	73,2 (baik)	71,91 (Baik)	-1,29%

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	81 (Baik)	71,91 (Baik)	88,77%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Ket. (+/-)
----	-------------------	--------	-------------------	-------------------	---------------

6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	73,2 (baik)	71,91 (Baik)	-
---	--	--------	----------------	-------------------------	---

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

- Indeks tata kelola pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Berau terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional meliputi system pengadaan , segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP(Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering(Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering& Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa(SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ).

Penilaian Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) dilakukan oleh LKPP.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal untuk pengukuran tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) indikator dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan:	
	SiRUP	10%

	E-Tendering	20%
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30%
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40%

Predikat nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Predikat
1	100	Istimewa
2	>90 s.d <100	Sangat Baik
3	>70 s.d 90	Baik
4	≥50 s.d 70	Cukup
5	<50	Kurang

Hasil Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada website :

[https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelolapengadaan\(itkp\)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah\(klpemda\)tahun2023](https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelolapengadaan(itkp)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah(klpemda)tahun2023)

No.	Nama K/L/PD	Nilai per Indikator								Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat	Ket
		(1) SIRUP	(2) E-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non eTendering/ Non ePurchasing	e-Contrak	(3) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	(4) Tingkat Kematangan UKPB			
458	Kab. Berau	9,63	5,00	0	0	3,52	3,37	10,39	40	71,91	Baik	

Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2023

- SIRUP : 9,63
- E-Tendering : 5,00
- E-Purchasing : 0
- Non E- Tendering/Non E-Purchasing : 3,52
- E – Kontral : 4,2
- Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ : 10,39
- Tingkat Kematangan UKPBJ : 40
- Total Nilai Pembobotan : 71,91
- Predikat : Baik

Penyebab Peningkatan/Penurunan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 antara lain :

1. PPK yang melakukan proses PBJ menggunakan metode e-Purchasing dan Toko Daring belum menyelesaikan proses yang ada di ekatalog (pengiriman barang, serah terima)

SASARAN V

INDIKATOR KATEGORI MENINGKATNYA REALISASI APBD

Tabel III.11
Sasaran V Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100	76,46	76,46

7. Indikator Kategori Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD

Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100	76,46	76,46

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Peningka n/Penur unan

7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	88,05	76,46	-11,59
---	--	--------	-------	-------	--------

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Ralisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Indeks	100	76,46	76,46

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Ket. (+/-)
			2022	2023	
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	88,05	76,46	-

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator presentase realisasi pelaksanaan Kegiatan APBD target 100 dan realisasi **76,46**.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 antara lain :

1. Terlambat terlaksananya paket pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan di awal semester I (pertama) di tahun 2023.

Solusi :

1. Melakukan evaluasi kegiatan terhadap pencapaian progress kemajuan realisasi fisik dan keuangan.
2. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaporan setiap bulan ke OPD, 13 Kecamatan dan ke Provinsi.
3. Melaksanakan rapat evaluasi pelaporan terhadap kegiatan pembangunan setiap bulan.
4. Mengintegrasikan seluruh system pelaporan yang berhubungan dengan monitoring evaluasi fisik dan keuangan yg bersumber biaya langsung APBD Kabupaten, Bankeu dan DAK APBN.

=====
Analisis Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah
=====

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari ke 5 (lima) sasaran menunjukkan pencapaian yang berbeda ada yang mencapai target dan yang tidak mencapai target sebagaimana dapat terlihat pada tabel diatas.

Meningkatnya 5 indikator menunjukkan pencapaian 69 % sampai 130 %. Sebagai contoh untuk Nilai Indeks RB Kabupaten Berau capaian kinerja 69,45, hasil evaluasi LKJIP Kab.Berau capaian kinerja sebesar 93,13, nilai survei kepuasan masyarakat dengan capaian 100, untuk Status/Predikat LPPD capaian kinerja 93, untuk Presentase Permasalahan Hukum capaian kinerja sebesar 130 %, Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa capaian kinerja mencapai target sebesar 90,39% dan Presentase Pelaksanaan Kegiatan APBD dengan capaian kinerja sebesar 76,46%. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian indikator sasaran dan efisiensi penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.12

Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	69,45	88,11	-18,66
		Nilai/Predikat AKIP	93,13	88,11	5,02
		Survei Kepuasan Masyarakat	100	78,83	21,17
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab. Berau	93,74	95,74	-2
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	130	90,34	39,66
4	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	90,39	87,5	2,89
5	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	76,46	76,46	0

E. Realisasi Anggaran

Tabel III.13
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
URUT				
1	2	3	4	5
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)	138.821.917.083,00	119.478.759.894,00	86,07
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)	73.116.775.734,00	63.560.530.018,00	86,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.998.800,00	86.456.680,00	62,65

1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87.999.800,00	55.286.880,00	62,83
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.999.000,00	31.169.800,00	62,34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.838.389.293,00	20.627.434.533,00	90,32
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.660.310.293,00	19.662.593.533,00	90,78
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	966.040.000,00	768.175.000,00	79,52
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	212.039.000,00	196.666.000,00	92,75
Admnistrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		888.274.000,00	416.510.005,00	46,89
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000,00	227.933.000,00	79,36
7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000,00	-	0,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000,00	188.577.005,00	34,80
Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		8.685.745.500,00	6.328.053.427,00	62,65
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	56.601.500,00	56,60
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500,00	948.353.816,00	67,21
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000,00	309.324.000,00	67,77
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	205.400.000,00	100.309.000,00	48,84
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.162.837.000,00	1.408.842.864,00	65,14
14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.350.000.000,00	3.504.622.247,00	80,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.138.774.000,00	7.596.735.043,00	93,34
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.194.430.000,00	2.919.530.000,00	91,39
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000,00	4.677.205.043,00	94,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.405.610.440,00	10.845.175.755,00	62,65
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000,00	4.200.000,00	76,39
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.021.592.000,00	7.659.587.637,00	95,49
19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	156.540.000,00	128.253.563,00	81,93
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.980.440,00	3.053.134.555,00	94,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.484.002.528,00	3.249.986.663,00	62,65
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.830.000,00	492.504.882,00	63,81

	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000,00	945.185.027,00	70,71
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000,00	68.814.000,00	43,96
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640,00	651.666.121,00	80,13
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888,00	1.091.816.633,00	77,67
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900.582.643,00	769.400.991,00	62,65
	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.746.643,00	169.400.991,00	87,89
	27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107.836.000,00	-	0,00
	28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah		3.426.347.200,00	2.195.139.043,00	62,65
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.072.609.600,00	695.603.600,00	64,85
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	655.931.600,00	441.234.660,00	67,27
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000,00	1.058.300.783,00	62,33
	Penataan Organisasi		2.024.109.400,00	1.750.184.564,00	62,65
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400,00	689.237.465,00	89,94
	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509.250.000,00	401.460.716,00	78,83
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000,00	659.486.383,00	88,11
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		10.186.941.930,00	9.695.453.314,00	62,65
	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000,00	1.418.294.900,00	99,33
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000,00	7.724.541.894,00	94,70
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930,00	552.616.520,00	91,78
1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		57.175.205.725,00	49.286.229.188,00	86,20
	Administrasi Tata Pemerintahan		3.705.078.000,00	3.448.717.130,00	93,08
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.281.803.000,00	1.250.281.504,00	97,54
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.631.115.000,00	1.440.002.193,00	88,28
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	792.160.000,00	758.433.433,00	95,74
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		50.389.475.525,00	43.148.950.120,00	97,54
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.786.752.431,00	27.911.463.554,00	85,13
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.826.912.900,00	6.806.109.676,00	77,11

	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.775.810.194,00	8.431.376.890,00	96,08
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.605.501.200,00	2.230.094.419,00	97,54
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	.018.726.000,00	832.886.654,00	81,76
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	708.748.000,00	640.313.850,00	90,34
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	878.027.200,00	756.893.915,00	86,20
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		475.151.000,00	458.467.519,00	97,54
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	339.531.000,00	327.432.148,00	96,44
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	135.620.000,00	131.035.371,00	96,62
1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		6.965.301.304,00	5.158.258.105,00	74,06
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.125.000.000,00	793.427.970,00	70,53
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000,00	254.482.412,00	50,90
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000,00	429.390.209,00	95,42
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00	109.555.349,00	62,60
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.015.481.000,00	754.701.304,00	50,90
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000,00	745.880.854,00	93,43
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000,00	25.560.605,00	89,82
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000,00	483.259.845,00	76,46
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2.759.820.304,00	2.383.797.799,00	50,90
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	991.115.000,00	867.264.358,00	87,50
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	04.637.304,00	939.469.680,00	85,05
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	664.068.000,00	577.063.761,00	86,90
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.564.634.320,00	1.473.742.583,00	94,19
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000,00	5.993.400,00	54,78
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000,00	96.566.275,00	98,98
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000,00	10.944.000,00	100,00

4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.857.732,00	99,91
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000,00	2.198.000,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000,00	334.700.188,00	89,27
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320,00	627.935.050,00	93,77
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000,00	128.397.488,00	98,77
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000,00	43.940.000,00	99,98
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.948.000,00	45.711.450,00	97,37
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.499.000,00	100,00

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah, maka laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersebar pada sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Berau secara rinci realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel III.14

Alokasi Anggaran Belanja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)		%
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (62)	C (43,06)	69,45	Rp. 600.000.000,-	Rp. 659.486.383,-	109,91
2	Nilai/Predikat AKIP	B (67)	B (62,40)	93, 13	Rp. 600.000.000,-	Rp. 659.486.383,-	109,91
3	Survei Kepuasan Masyarakat	A(92,16)	A (92,16)	100	Rp. 600.000.000,-	Rp. 401.460.716,-	66,91

4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Tinggi (3,41)	Sedang (3,1964)	93,74	Rp.792.160.000	Rp.758.433.433,-	95,74
5	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	100%	130%	130%	Rp. 708.748.000,-	Rp. 640.313.850,-	90,34%
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65 (CUKUP)	71,91 (Baik)	109,5%	Rp. 991.115.000,	Rp. 867.264.358,	87,50
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	76,46%	76,46%	Rp. 632.052.000,-	Rp. 483.259.845,-	76,46

Sumber : DPA Perubahan Sekretariat Daerah, 2023

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dalam tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian sesuai dengan rencananya. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 13,109,989,904.00,- terealisasi Rp 10.567.495.216.00,- atau 80.61%, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 86%, Hasil analisis pelaksanaan realisasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dalam tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

Tabel III.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sasaran I : Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efisien dan melayani				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Penataan Organisasi	2,024,109,400.00	1,750,184,564.00	86.47
Sasaran II : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah				
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	.		
	Administrasi Tata Pemerintahan	3,705,078,000.00	3,448,717,130.00	93.08
Sasaran III : Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum				

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,605,501,200.00	2,230,094,419.00	85.59
Sasaran IV : Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)				
3	Program Perekonomian dan Pembangunan			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2,015,481,000.00	754,701,304.00	50.90
Sasaran V : Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,759,820,304.00	2,383,797,799.00	86.38
Jumlah		13,109,989,904.00	10.567.495.216.00	80.61

Sumber : DPA Perubahan Sekretariat Daerah, 2023

Bab IV Penutup

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu dalam pengumpulan data kepada bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tidak tepat waktu dalam menyampaikan data dan informasi pendukung baik data kinerja dan

keuangan, sehingga menghambat penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau. Dimana pengumpulan Laporan Kinerja ini mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian PAN dan RB. Namun berkat kerja keras serta ketekunan TIM dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja ini dapat disusun hingga selesai.

Demikian Laopran Kinerja Sekretariat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dibuat sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

- *RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023*
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- **PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**
- **RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023**
- **REALISASI BELANJA TAHUN 2023**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Birokrasi yang efektif,efesien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (67)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (92,16)
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi
3.	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persentase	100%
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	65 (CUKUP)
5.	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persentase	100%

Tanjung Redeb, Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



***Ir. H. AGUS WAHYUDI, MM**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630812 199403 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

JL. APT. PRANOTO NO .01 Telp .21076 fax (0554) 21068

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. AGUS WAHYUDI, MM

Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Hj. JUNIARSIH MAS, M.pd

Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb,

Januari 2023


BUPATI BERAU
Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH
Ir. AGUS WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630812 199403 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62)
		Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	B (67)
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (92,16)
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persentase	100 %
4	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	65 (cukup)
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persentase	100 %

Tanjung Redeb, Februari 2023


 BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIASIH MAS, M.Pd


 SEKRETARIS DAERAH,
 SEKRETARIAT DAERAH
Ir. M. GAZALIS, IP, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19621227 199003 1 005

PROGRAM ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Penataan Organisasi	Rp. 54.021.699.200
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Rp. 31.282.798.000
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.298.881.304


 BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIASIH MAS, M.Pd


 SEKRETARIS DAERAH,
 SEKRETARIAT
 DAERAH
Ir. M. GAZALI S.IP, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19621227 199003 1 005



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023**

Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

- Fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Organisasi Perangkat Daerah
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Semua PD	Sekretaris Daerah/Bagian Organisasi dan Inspektorat
		Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Hasil Evaluasi	Semua PD	Bagian Organisasi
		Survey Kepuasan Masyarakat		Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Berau	Status	Hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dan Kemendagri	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Tapem
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	Presentase permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	-	-	Sekretariat Daerah/Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
	Meningkatnya	Nilai Indeks tata	Nilai	-	-	Sekretariat

	pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	kelola pengadaan barang dan jasa				Daerah/Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5	Meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD	Presentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Persen	-	Semua PD	Sekretariat Daerah/Bagian Pembangunan

Tanjung Redeb, Februari 2023


 BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIASIH MAS, M.Pd

Pj. SEKRETARIS DAERAH


H. AGUS WAHYUDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630812 199403 1 010

**RENCANA AKSI SETDA KAB. BERAU
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan	Anggaran								Penanggungjawab	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan					(Rp)	APBD				APBN				
					I	II	III	IV			Rencana Aksi Per Triwulan				Rencana Aksi Per Triwulan				
											I	II	III	IV	I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (62)														Bagian Organisasi
		2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	B (67)														
		3	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (92,16)														
									1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,032,750,000	413,100,000	309,825,000	206,550,000	103,275,000				Bagian Organisasi
								1	1	1	509,250,000	203,700,000	152,775,000	101,850,000	50,925,000				
								1	2	2	523,500,000	209,400,000	157,050,000	104,700,000	52,350,000				
						2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok										
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kinerja daerah	1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Berau	Predikat/ S tatus	Tinggi														Bagian Tata Pemerintahan
									2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	420,000,000	168,000,000	126,000,000	84,000,000	42,000,000				Bagian Tata Pemerintahan
						1 Dok	1 Dok	1 Dok		1	420,000,000	168,000,000	126,000,000	84,000,000	42,000,000				
										1	1	1	1	1					
3	Meningkatnya bantuan penyelesaian kasus hukum	1	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100%														Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah

									3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	588,748,000	235,499,200	176,624,400	117,749,600	58,874,800					Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
					3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	1	Fasilitasi Bantuan Hukum	588,748,000	235,499,200	176,624,400	117,749,600	58,874,800					
4	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	65 (Cukup)															Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
									4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	599,980,000	239,992,000	179,994,000	119,996,000	59,998,000					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
					38%	28,5%	19%	9,5%	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	599,980,000	239,992,000	179,994,000	119,996,000	59,998,000					
5	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan APBD	1	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persen	100%															Bagian Administrasi Pembangunan
									5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	447,052,000	178,820,800	134,115,600	89,410,400	44,705,200					Bagian Administrasi Pembangunan
					3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	447,052,000	178,820,800	134,115,600	89,410,400	44,705,200					

Tanjung Redeb, Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH



REALISASI KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU										
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI 2023	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023	REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023						SISA ANGGARAN TAHUN 2023
				BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLA H	%	
	SEKRETARIAT DAERAH	90,784,433,652.00	138,821,917,083.00	110,486,561,512.00	8,992,198,382.00	-	-	119,478,759,894.00	86.07	19,343,157,189.00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	90,784,433,652.00	138,821,917,083.00	110,486,561,512.00	8,992,198,382.00	-	-	119,478,759,894.00	86.07	19,343,157,189.00
1.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	32,909,036,396.00	39,368,205,176.00	35,704,836,643.00	-	-	-	35,704,836,643.00	90.69	3,663,368,533.00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,909,036,396.00	39,368,205,176.00	35,704,836,643.00	-	-	-	35,704,836,643.00	90.69	3,663,368,533.00
4.01.01.02.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	137,998,800.00	86,456,680.00	-	-	-	86,456,680.00	-	51,542,120.00
4.01.01.2.01.03	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	87,999,800.00	55,286,880.00	-	-	-	55,286,880.00	62.83	32,712,920.00
4.01.01.2.01.05	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	49,999,000.00	31,169,800.00	-	-	-	31,169,800.00	62.34	18,829,200.00
4.01.01.02.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,813,007,500.00	22,838,389,293.00	20,627,434,533.00	-	-	-	20,627,434,533.00	90.32	2,210,954,760.00
4.01.01.2.02.01	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,603,768,500.00	21,660,310,293.00	19,662,593,533.00	-	-	-	19,662,593,533.00	90.78	1,997,716,760.00
4.01.01.2.02.02	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	999,600,000.00	966,040,000.00	768,175,000.00	-	-	-	768,175,000.00	79.52	197,865,000.00
4.01.01.2.02.05	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	209,639,000.00	212,039,000.00	196,666,000.00	-	-	-	196,666,000.00	92.75	15,373,000.00
4.01.01.02.06	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,800,000,000.00	4,350,000,000.00	3,504,622,247.00	-	-	-	3,504,622,247.00	80.57	845,377,753.00
4.01.01.2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,800,000,000.00	4,350,000,000.00	3,504,622,247.00	-	-	-	3,504,622,247.00	80.57	845,377,753.00
4.01.01.02.08	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,503,488,080.00	11,249,070,440.00	10,716,922,192.00	-	-	-	10,716,922,192.00	95.27	532,148,248.00
4.01.01.2.08.01	7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,498,000.00	5,498,000.00	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	76.39	1,298,000.00
4.01.01.2.08.02	8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,497,992,000.00	8,021,592,000.00	7,659,587,637.00	-	-	-	7,659,587,637.00	95.49	362,004,363.00
4.01.01.2.08.04	9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,999,998,080.00	3,221,980,440.00	3,053,134,555.00	-	-	-	3,053,134,555.00	94.76	168,845,885.00
4.01.01.02.11	11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	792,540,816.00	792,746,643.00	769,400,991.00	-	-	-	769,400,991.00	97.06	23,345,652.00
4.01.01.2.11.01	10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192,540,816.00	192,746,643.00	169,400,991.00	-	-	-	169,400,991.00	87.89	23,345,652.00
4.01.01.2.11.04	11. Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	-	600,000,000.00	100.00	-
2.	BAGIAN UMUM	11,032,821,404.00	21,537,519,228.00	8,970,975,454.00	7,439,080,043.00	-	-	16,410,055,497.00	76.19	5,127,463,731.00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,032,821,404.00	21,537,519,228.00	8,970,975,454.00	7,439,080,043.00	-	-	16,410,055,497.00	76.19	5,127,463,731.00
4.01.01.02.05	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	546,374,000.00	888,274,000.00	416,510,005.00	-	-	-	416,510,005.00	46.89	471,763,995.00
4.01.01.2.05.02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287,214,000.00	287,214,000.00	227,933,000.00	-	-	-	227,933,000.00	79.36	59,281,000.00
4.01.01.2.05.07	2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	59,160,000.00	59,160,000.00	-	-	-	-	-	-	59,160,000.00
4.01.01.2.05.09	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	200,000,000.00	541,900,000.00	188,577,005.00	-	-	-	188,577,005.00	34.80	353,322,995.00

	Fungsi										
4.01.01.02.06	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,759,156,500.00	4,335,745,500.00	2,246,156,180.00	577,275,000.00	-	-	2,823,431,180.00	65.12	1,512,314,320.00	
4.01.01.2.06.01	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,000,000.00	100,000,000.00	56,601,500.00	-	-	56,601,500.00	56.60	43,398,500.00		
4.01.01.2.06.02	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	882,875,500.00	1,411,083,500.00	501,178,816.00	447,175,000.00	-	948,353,816.00	67.21	462,729,684.00		
4.01.01.2.06.03	6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	232,998,000.00	456,425,000.00	179,224,000.00	130,100,000.00	-	309,324,000.00	67.77	147,101,000.00		
4.01.01.2.06.05	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125,000,000.00	205,400,000.00	100,309,000.00	-	-	100,309,000.00	48.84	105,091,000.00		
4.01.01.2.06.08	8. Fasilitas Kunjungan Tamu	1,418,283,000.00	2,162,837,000.00	1,408,842,864.00	-	-	1,408,842,864.00	65.14	753,994,136.00		
4.01.01.02.07	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	8,138,774,000.00	780,680,000.00	6,816,055,043.00	-	7,596,735,043.00	93.34	542,038,957.00		
4.01.01.2.07.01	9. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	3,194,430,000.00	680,000.00	2,918,850,000.00	-	2,919,530,000.00	91.39	274,900,000.00		
4.01.01.2.07.02	10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	4,944,344,000.00	780,000,000.00	3,897,205,043.00	-	4,677,205,043.00	94.60	267,138,957.00		
4.01.01.02.08	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,540,000.00	156,540,000.00	128,253,563.00	-	-	128,253,563.00	81.93	28,286,437.00		
4.01.01.2.08.03	11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156,540,000.00	156,540,000.00	128,253,563.00	-	-	128,253,563.00	81.93	28,286,437.00		
4.01.01.02.09	9. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,254,072,704.00	4,484,002,528.00	3,204,236,663.00	45,750,000.00	-	3,249,986,663.00	72.48	1,234,015,865.00		
4.01.01.2.09.01	12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	704,330,000.00	771,830,000.00	492,504,882.00	-	-	492,504,882.00	63.81	279,325,118.00		
4.01.01.2.09.02	13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,356,130,000.00	1,336,630,000.00	945,185,027.00	-	-	945,185,027.00	70.71	391,444,973.00		
4.01.01.2.09.06	14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156,540,000.00	156,540,000.00	68,814,000.00	-	-	68,814,000.00	43.96	87,726,000.00		
4.01.01.2.09.10	15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	804,935,520.00	813,300,640.00	642,616,121.00	9,050,000.00	-	651,666,121.00	80.13	161,634,519.00		
4.01.01.2.09.11	16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,232,137,184.00	1,405,701,888.00	1,055,116,633.00	36,700,000.00	-	1,091,816,633.00	77.67	313,885,255.00		
4.01.01.02.11	11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	107,836,000.00	107,836,000.00	-	-	-	-	-	107,836,000.00		
4.01.01.2.11.03	15. Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107,836,000.00	107,836,000.00	-	-	-	-	-	107,836,000.00		
4.01.01.02.12	12. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,208,842,200.00	3,426,347,200.00	2,195,139,043.00	-	-	2,195,139,043.00	64.07	1,231,208,157.00		
4.01.01.2.12.01	16. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	999,960,600.00	1,072,609,600.00	695,603,600.00	-	-	695,603,600.00	64.85	377,006,000.00		
4.01.01.2.12.02	17. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	805,931,600.00	655,931,600.00	441,234,660.00	-	-	441,234,660.00	67.27	214,696,940.00		
4.01.01.2.12.03	18. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,402,950,000.00	1,697,806,000.00	1,058,300,783.00	-	-	1,058,300,783.00	62.33	639,505,217.00		
3.	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1,597,749,400.00	2,024,109,400.00	1,750,184,564.00	-	-	1,750,184,564.00	86.47	273,924,836.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,597,749,400.00	2,024,109,400.00	1,750,184,564.00	-	-	1,750,184,564.00	86.47	273,924,836.00		
4.01.01.02.13	13. Penataan Organisasi	1,597,749,400.00	2,024,109,400.00	1,750,184,564.00	-	-	1,750,184,564.00	86.47	273,924,836.00		
4.01.01.2.13.01	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	564,999,400.00	766,359,400.00	689,237,465.00	-	-	689,237,465.00	89.94	77,121,935.00		

4.01.01.2.13.02	2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509,250,000.00	509,250,000.00	401,460,716.00	-	-	-	401,460,716.00	78.83	107,789,284.00
4.01.01.2.13.03	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	523,500,000.00	748,500,000.00	659,486,383.00	-	-	-	659,486,383.00	88.11	89,013,617.00
4.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8,482,092,000.00	10,186,941,930.00	9,372,460,463.00	322,992,851.00	-	-	9,695,453,314.00	95.18	491,488,616.00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,482,092,000.00	10,186,941,930.00	9,372,460,463.00	322,992,851.00	-	-	9,695,453,314.00	95.18	491,488,616.00
4.01.01.02.14	14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8,482,092,000.00	10,186,941,930.00	9,372,460,463.00	322,992,851.00	-	-	9,695,453,314.00	95.18	491,488,616.00
4.01.01.2.14.01	1. Fasilitasi Keprotokolan	949,990,000.00	1,427,790,000.00	1,405,307,900.00	12,987,000.00	-	-	1,418,294,900.00	99.33	9,495,100.00
4.01.01.2.14.02	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7,380,000,000.00	8,157,050,000.00	7,458,902,743.00	265,639,151.00	-	-	7,724,541,894.00	94.70	432,508,106.00
4.01.01.2.14.03	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	152,102,000.00	602,101,930.00	508,249,820.00	44,366,700.00	-	-	552,616,520.00	91.78	49,485,410.00
5.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2,360,000,000.00	3,705,078,000.00	3,105,887,130.00	342,830,000.00	-	-	3,448,717,130.00	93.08	256,360,870.00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,360,000,000.00	3,705,078,000.00	3,105,887,130.00	342,830,000.00	-	-	3,448,717,130.00	93.08	256,360,870.00
4.01.02.02.01	1. Administrasi Tata Pemerintahan	2,360,000,000.00	3,705,078,000.00	3,105,887,130.00	342,830,000.00	-	-	3,448,717,130.00	93.08	256,360,870.00
4.01.02.2.01.01	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	1,040,000,000.00	1,281,803,000.00	1,243,901,504.00	6,380,000.00	-	-	1,250,281,504.00	97.54	31,521,496.00
4.01.02.2.01.02	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	900,000,000.00	1,631,115,000.00	1,136,802,193.00	303,200,000.00	-	-	1,440,002,193.00	88.28	191,112,807.00
4.01.02.2.01.03	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	420,000,000.00	792,160,000.00	725,183,433.00	33,250,000.00	-	-	758,433,433.00	95.74	33,726,567.00
6.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26,870,376,800.00	50,389,475,525.00	42,936,875,332.00	212,074,788.00	-	-	43,148,950,120.00	85.63	7,240,525,405.00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26,870,376,800.00	50,389,475,525.00	42,936,875,332.00	212,074,788.00	-	-	43,148,950,120.00	85.63	7,240,525,405.00
4.01.02.02.02	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26,870,376,800.00	50,389,475,525.00	42,936,875,332.00	212,074,788.00	-	-	43,148,950,120.00	85.63	7,240,525,405.00
4.01.02.2.02.01	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14,329,381,000.00	32,786,752,431.00	27,820,439,160.00	91,024,394.00	-	-	27,911,463,554.00	85.13	4,875,288,877.00
4.01.02.2.02.02	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6,401,000,000.00	8,826,912,900.00	6,736,083,676.00	70,026,000.00	-	-	6,806,109,676.00	77.11	2,020,803,224.00
4.01.02.2.02.03	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	6,139,995,800.00	8,775,810,194.00	8,380,352,496.00	51,024,394.00	-	-	8,431,376,890.00	96.08	344,433,304.00
7.	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	2,052,421,200.00	3,080,652,200.00	2,499,372,238.00	189,189,700.00	-	-	2,688,561,938.00	87.27	392,090,262.00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,052,421,200.00	3,080,652,200.00	2,499,372,238.00	189,189,700.00	-	-	2,688,561,938.00	87.27	392,090,262.00
4.01.02.02.03	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,657,301,200.00	2,605,501,200.00	2,151,631,719.00	78,462,700.00	-	-	2,230,094,419.00	85.59	375,406,781.00
4.01.02.2.03.01	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	740,526,000.00	1,018,726,000.00	832,886,654.00	-	-	-	832,886,654.00	81.76	185,839,346.00
4.01.02.2.03.02	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	588,748,000.00	708,748,000.00	640,313,850.00	-	-	-	640,313,850.00	90.34	68,434,150.00
4.01.02.2.03.03	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	328,027,200.00	878,027,200.00	678,431,215.00	78,462,700.00	-	-	756,893,915.00	86.20	121,133,285.00
4.01.02.02.04	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	395,120,000.00	475,151,000.00	347,740,519.00	110,727,000.00	-	-	458,467,519.00	96.49	16,683,481.00
4.01.02.2.04.01	4. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	309,500,000.00	339,531,000.00	216,705,148.00	110,727,000.00	-	-	327,432,148.00	96.44	12,098,852.00
4.01.02.2.04.03	5. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	85,620,000.00	135,620,000.00	131,035,371.00	-	-	-	131,035,371.00	96.62	4,584,629.00
8.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1,050,000,000.00	2,190,000,000.00	972,095,002.00	47,664,000.00	-	-	1,019,759,002.00	46.56	1,170,240,998.00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,050,000,000.00	2,190,000,000.00	972,095,002.00	47,664,000.00	-	-	1,019,759,002.00	46.56	1,170,240,998.00
4.01.03.02.01	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,050,000,000.00	1,125,000,000.00	763,151,970.00	30,276,000.00	-	-	793,427,970.00	70.53	331,572,030.00
4.01.03.2.01.01	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	475,000,000.00	500,000,000.00	237,094,412.00	17,388,000.00	-	-	254,482,412.00	50.90	245,517,588.00
4.01.03.2.01.02	2. Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian	400,000,000.00	450,000,000.00	416,502,209.00	12,888,000.00	-	-	429,390,209.00	95.42	20,609,791.00

4.01.03.2.01.03	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	175,000,000.00	175,000,000.00	109,555,349.00	-	-	-	109,555,349.00	62.60	65,444,651.00
4.01.03.02.04	4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	1,065,000,000.00	208,943,032.00	17,388,000.00	-	-	226,331,032.00	21.25	838,668,968.00
4.01.03.2.04.02	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	-	1,065,000,000.00	208,943,032.00	17,388,000.00	-	-	226,331,032.00	21.25	838,668,968.00
9.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,580,481,000.00	2,015,481,000.00	1,471,657,304.00	283,044,000.00	-	-	1,754,701,304.00	87.06	260,779,696.00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,580,481,000.00	2,015,481,000.00	1,471,657,304.00	283,044,000.00	-	-	1,754,701,304.00	87.06	260,779,696.00
4.01.03.02.02	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,580,481,000.00	2,015,481,000.00	1,471,657,304.00	283,044,000.00	-	-	1,754,701,304.00	87.06	260,779,696.00
4.01.03.2.02.01	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	698,335,000.00	798,335,000.00	557,559,854.00	188,321,000.00	-	-	745,880,854.00	93.43	52,454,146.00
4.01.03.2.02.02	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	435,094,000.00	585,094,000.00	520,337,605.00	5,223,000.00	-	-	525,560,605.00	89.82	59,533,395.00
4.01.03.2.02.03	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	447,052,000.00	632,052,000.00	393,759,845.00	89,500,000.00	-	-	483,259,845.00	76.46	148,792,155.00
10.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,668,400,304.00	2,759,820,304.00	2,278,724,799.00	105,073,000.00	-	-	2,383,797,799.00	86.38	376,022,505.00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,668,400,304.00	2,759,820,304.00	2,278,724,799.00	105,073,000.00	-	-	2,383,797,799.00	86.38	376,022,505.00
4.01.03.02.03	3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,668,400,304.00	2,759,820,304.00	2,278,724,799.00	105,073,000.00	-	-	2,383,797,799.00	86.38	376,022,505.00
4.01.03.2.03.01	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	600,554,000.00	991,115,000.00	866,226,358.00	1,038,000.00	-	-	867,264,358.00	87.50	123,850,642.00
4.01.03.2.03.02	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	625,778,304.00	1,104,637,304.00	835,434,680.00	104,035,000.00	-	-	939,469,680.00	85.05	165,167,624.00
4.01.03.2.03.03	3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	442,068,000.00	664,068,000.00	577,063,761.00	-	-	-	577,063,761.00	86.90	87,004,239.00
11.	KANTOR PENGHUBUNG	1,181,055,148.00	1,564,634,320.00	1,423,492,583.00	50,250,000.00	-	-	1,473,742,583.00	94.19	90,891,737.00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,181,055,148.00	1,564,634,320.00	1,423,492,583.00	50,250,000.00	-	-	1,473,742,583.00	94.19	90,891,737.00
4.01.01.02.06	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,914,800.00	269,446,000.00	213,111,407.00	50,250,000.00	-	-	263,361,407.00	97.74	6,084,593.00
4.01.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	10,940,000.00	5,993,400.00	-	-	-	5,993,400.00	54.78	4,946,600.00
4.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,970,800.00	97,562,000.00	46,316,275.00	50,250,000.00	-	-	96,566,275.00	98.98	995,725.00
4.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,944,000.00	10,944,000.00	10,944,000.00	-	-	-	10,944,000.00	100.00	-
4.01.01.2.06.09	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	150,000,000.00	149,857,732.00	-	-	-	149,857,732.00	99.91	142,268.00
4.01.01.02.08	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909,692,548.00	1,046,790,320.00	964,833,238.00	-	-	-	964,833,238.00	92.17	81,957,082.00
4.01.01.2.08.01	5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,198,000.00	2,198,000.00	2,198,000.00	-	-	-	2,198,000.00	100.00	-
4.01.01.2.08.02	6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242,000,000.00	374,920,000.00	334,700,188.00	-	-	-	334,700,188.00	89.27	40,219,812.00
4.01.01.2.08.04	7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665,494,548.00	669,672,320.00	627,935,050.00	-	-	-	627,935,050.00	93.77	41,737,270.00
4.01.01.02.09	9. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,447,800.00	248,398,000.00	245,547,938.00	-	-	-	245,547,938.00	98.85	2,850,062.00
4.01.01.2.09.02	8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000.00	130,000,000.00	128,397,488.00	-	-	-	128,397,488.00	98.77	1,602,512.00
4.01.01.2.09.06	9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,950,000.00	43,950,000.00	43,940,000.00	-	-	-	43,940,000.00	99.98	10,000.00
4.01.01.2.09.09	10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,997,800.00	46,948,000.00	45,711,450.00	-	-	-	45,711,450.00	97.37	1,236,550.00
4.01.01.2.09.10	11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,500,000.00	27,500,000.00	27,499,000.00	-	-	-	27,499,000.00	100.00	1,000.00

The image features the official coat of arms of Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. The emblem is shield-shaped with a light blue background and is framed by a decorative yellow border with a repeating knot-like pattern. Inside the shield, there is a central yellow five-pointed star at the top. Below the star, two crossed white spears with black shafts are positioned. A white banner with black text is draped across the spears. Below the spears, a yellow laurel wreath is visible. At the bottom of the shield, a black silhouette of a turtle is shown. A yellow banner at the very bottom of the shield contains the word "BATIWAKKAL" in black capital letters.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023**

**DISUSUN OLEH
*BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN***